

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Harjanti, Wiwik. “*Pengaruh Perkembangan Konsep Kepentingan Umum Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Di Indonesia.*” PT. Media Risalah Hukum, 2017.
- Indra Muchlis Adnan. *Negara Hukum Dan Demokrasi: Dinamika Negara Hukum Dalam Sistem Demokrasi Pancasila Di Indonesia.* Daerah Istimewa Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2019.
- Isnaini, and Anggreni. A Lubis. *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif.* Medan: CV. Pustaka Prima, 2022.
- Muwahid. *Hukum Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.* Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum.* Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING, 2021.
- Sugianto, Leliya. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum: Sebuah Analisis Dalam Prespektif Hukum & Dampak Terhadap Prilaku Ekonomi Masyarakat.* Yogyakarta: DEEPUBLISH CV. BUDI UTAMA, 2017.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum.* UIN Jakarta Bersama Yayasan Pendidikan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2019.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Di Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan.* Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020.
- Wahyu Widodo. *Hukum Lingkungan. Sustainability (Switzerland).* Jakarta: Damera Press, 2023.
- Yusri, Ahmand Zaki dan Diyan. *Hukum Agraria Indonesia. Perum Gumpang Baru.* Solo: Perum Gumpang Baru, 2017.

B. Jurnal Ilmiah :

- Adriansa, Muhammad Zaky, Nur Adhim, and Ana Silviana. “*Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo*”

- (Tahap I)(Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas).” *Diponegoro Law Journal* 9, no. 1 (2020): 138–54.
- Ali, Arifin. “Konflik Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Di Dinas Perumahan Permukiman Dan Pertanahan Kota Tidore Kepulauan).” *Jurnal Akrab Juara* 6, no. 2408 (2016): 142–57.
- Amalia, Muthi, and Elly Malihah. “Konflik Pembebasan Lahan Pembangunan Bendungan Jatigede Di Desa Wado.” *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* 6, no. 2 (2016).
- Amalia, Rizky. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Yuridika* 27, no. 3 (2022): 267–80.
- Andrianto, Fadly. “Kepastian Hukum Dalam Politik Hukum Di Indonesia.” *Administrative Law and Governance Journal* 3, no. 1 (2020): 114–23.
- Apriyanto, Nova, and Ufran Ufran. “Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi Atas Tanah Menurut UU No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Indonesia Berdaya* 4, no. 2 (2023): 447–52.
- Asgaf, A. “Pengadaan Tanah Untuk Tempat Pembuangan Dan Pengelolaan Sampah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang” *Lex Privatum V*, no. 10 (2019): 12–18.
- Busiri, Ahmad, Rahmawanto Fajar, Sri Sangkawati, and Hary Budienny. “Perencanaan Bendungan Bendo Ponorogo.” *Jurnal Karya Teknik Sipil* 5, no. 2 (2016): 159–69.
- Candrakirana, Isabela, Oloan Sitorus, and Widhianan Hestining Puri. “Konsolidasi Tanah Perkotaan Sebagai Instrumen Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.” *Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN* Vol. 13, N (2014): 601–20.
- Ekasari, Silviya, Abdul Halim, and Riman Riman. “Studi Analisis Stabilitas Tubuh Bendungan Pada Bendungan Pada Bendungan Banyu Urip Dengan Menggunakan Software Geostudio 2018 Di Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.” *Jurnal Teknik Sipil* 30, no. 1 (2023): 121–30.
- Faiz, Pan Mohamad. “Teori Keadilan John Rawls.” *Jurnal Konstitusi* 6, no. 1

(2009).

Fatkahul Arif, Muhammad. “Makna Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Lex Administratum*, no. 2 (2012): 1–11.

Fitriana, Rahayu. “Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Hr. Soebrantas Kota Pekanbaru Tahun 2011-2014).” *Procedia Manufacturing* 1, no. 22 Jan (2016): 1–17.

Idris, Vidiya Indriani, and Budi Santoso. “Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan.” *Jurnal USM Law Review* 6 (2023): 642–56.

Isnaeni, Diyan. “Konsep Hukum Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara.” *Yurisprudен* 3, no. 1 (2020): 93.

Koeswahyono, Imam, and Diah Maharani. “Rasionalisasi Pengadilan Agraria Di Indonesia Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Agraria Berkeadilan.” *Arena Hukum* 15, no. 1 (2022): 1–19.

Maulana Ananta, Rangga. “Pelaksanaan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Bendungan Sadawarna Di Kabupaten Subang Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Galang Tanjung*, no. 2504 (2022): 1–9.

Moghtaderi, Mina, Majid Saffarinia, Hossein Zare, and Ahmad Alipour. “Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Quarterly Journal of Health Psychology* 8, no. 32 (2020): 73–92.

Mukau, Raynolds A. “Mekanisme Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Jalan Tol Manado Bitung).” *Lex Administratum* 11, no. 1 (2020): 92–105.

Mulyono, Joko. “Konsepsi Keamanan Bendungan Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Bendungan.” *Jurnal Infrastruktur* 3, no. 1 (2017): 1–62.

- Muslih, Mohammad. “*Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch.*” *Legalitas* 4, no. 1 (2013): 130–52.
- Muwahid, Muwahid. “*Prinsip Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.*” *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (2016): 1–16.
- Nahak, Alfonsus. “*Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch.*” *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora* 2, no. 3 (2023): 11659–74.
- Nicholas, Aspin. “*Analisis Geologi Teknik Dalam Menentukan Tipe Bendungan Pada Rencana Pembangunan Bendungan Leuwikeris, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat.*” *SKRIPSI-2019*, 2019.
- Numberi, Elieser, Harmonis Rante, and Johni Jonathan Numberi. “*Analisis Pembangunan Bendungan Digoel Di Kabupaten Boven Digoel Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Di Papua.*” *Jurnal ELIPS Vol* 5, no. 3 (2022): 130–36.
- Nur, Muh Syainal, and Achmad Husen. “*Good Environmental Governance Dan Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat.*” *Jurnal Green Growth Dan Manajemen Lingkungan* 11, no. 1 (2022): 35–49.
- Nurlinda, Ida. “*Metode Konsolidasi Tanah Untuk Pengadaan Tanah Yang Partisipasif Dan Penataan Ruang Yang Terpadu.*” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 2 (2011): 161–74.
- Paru, Selni, Markus Kaunang, and Ismail Sumampouw. “*Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu.*” *Jurnal Eksekutif* 3, no. 3 (2019).
- Prabowo, Roni Imam. “*Implementasi Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jaringan SUTT 150 KV Rawalo – Majenang Kabupaten Banyumas).*” *Inisiasi* 11 No 1, J, no. 3 (2023): 35–40.
- Prasetyo, Agung Basuki. “*Prinsip Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.*” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 3 (2018): 259–67.

- Pravidjayanto, Mochammad Rafi, Nuraida Khoirun Nisa, Muhammad Alvin Nashir, and Mega Ayuningtyas. “Peran Bank Tanah Dalam Mengatasi Problematika Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum* 4, no. 2 (2023): 98–117.
- Rahpriangan, Desi. “Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendungan Kabupaten Bogor Dikatkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Repository.Unpas.Ac.Id*, no. 2 (2020): 1–23.
- Rosytha, Anna, and Wiel Mushawiry Suryana. “Peran Unit Pengelola Bendungan Dalam Pengelolaan Bendungan Berkelanjutan Di Satker OP BBWS Brantas (Studi Kasus UPB Bendungan Babjulmati Dan Bendungan Nipah).” *Publikasi Riset Orientasi Teknik Sipil (Proteksi)* 5, no. 1 (2023): 44–50.
- Santoso, Urip. “Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 188–98.
- Simanjuntak, Meliya Normawaty. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Berhak Atas Tanah Dalam Hal Ganti Kerugian UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.” *Premise Law* 2019, no. 2 (2021): 8.
- Sitorus, Oloan. “Penataan Hubungan Hukum Dalam Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Dan Pemanfaatan Sumber Daya Agraria (Studi Awal Terhadap Konsep Hak Atas Tanah Dan Ijin Usaha Pertambangan).” *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan* 2, no. 1 (2016): 1–11.
- Sukarno, Suci Wulandari. “Pemilihan Tipe Bendung Gerak Untuk Penahan Banjir Air Pasang Di Sungai Parit, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP).” Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Suparmoko, Muhammad. “Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional.” *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen* 9, no. 1 (2020): 39–50.
- Suraji, Suraji, Noudy Tendean, Hestiwati Basir, Adelia A., Ashifa Z. W, and KMS Ramadhan D. “Analisa Permasalahan Pengadaan Tanah Dan Dampak

- SosialPembangunan Jalan Tol Manado-Bitung.” Jurnal Media Birokrasi*, 2022, 85–98. <https://doi.org/10.33701/jmb.v4i2.2773>.
- Syofya, Heppi. “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 15, no. 2 (2018): 177–85.
- Tanzili, Mulyadi. “Asas Dan Prinsip Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum.” *Varia Hukum* 28.34 (2018): 1186–95.
- Teja, Mohammad. “Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Pesisir.” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 1 (2015): 63–76.
- Wahyono, Hendrawan, and Puput Wanarti Rusimamto. “Rancang Bangun Sistem Kontrol Ketinggian Air Bendungan Menggunakan Metode Pid.” *Jurnal Teknik Elektro* 8, no. 2 (2019).
- Wahyudi, Muhammad. “Analisa Kinerja Bendung Berdasarkan Aspek Fungsi Struktur Bangunan (Studi Kasus Bendung Pekatingan).” Teknik Sipil-Fakultas Teknik, 2017.
- Wiryanan, Bangkit A, and Suryawan Setianto. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Bendungan: Studi Kasus Bendungan Jatigede, Bendungan Cipanas Dan Bendungan Pidekso” 9 No. 10 (2022): 1–9.
- Wulansari, Aisha Cahya, Hari Nugroho, and Sriyana Sriyana. “Analisis Kinerja Dan Peningkatan Fungsi Bendung Guntur Kabupaten Demak Jawa Tengah.” *Jurnal Karya Teknik Sipil* 7, no. 2 (2018): 54–66.
- Yudha, Agung Retno, Suselo Utoyo, and Fadjar Purnomo. “Studi Kelayakan Pembangunan Bendungan Bagong Kabupaten Trenggalek.” *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa Konstruksi (JOS-MRK)* 3, no. 4 (2022): 241–45.
- Yudhanto, Febri, Priyo Katon Prasetyo, and Sudibyanung Sudibyanung. “Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bendungan Karian Dengan UU Pengadaan Tanah Di Kabupaten Lebak.” *Widya Bhumi* 1, no. 1 (2021): 39–57.
- Yusrizal, Muhammad. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *De Lega Lata* 2, no. 1

(2017):113–38.

C. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara